BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Perkawinan beda agama dalam Islam menjadi topik yang terus diperdebatkan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara tegas melarang perkawinan semacam itu, mengacu pada dalil-dalil agama. Ulama seperti Hamka mendukung pandangan MUI, menekankan pentingnya kesatuan agama dalam keluarga. Namun, ulama lain seperti Quraish Shihab dan Musdah Mulia menawarkan interpretasi yang lebih fleksibel, mempertimbangkan konteks sosial dan kemodernan.
2. MUI sebagai lembaga tertinggi ulama di Indonesia, mengeluarkan fatwa yang berfungsi untuk melarang pernikahan beda agama demi menjaga kepentingan umum (*mashlahah darūriyyat al-‘āmmat*) seperti kemurnian akidah, keharmonisan keluarga, dan kesatuan bangsa. Keputusan MUI ini didorong oleh berbagai pertimbangan, termasuk kekhawatiran merusak tatanan sosial, mengganggu lembaga perkawinan, dan dapat menyebabkan pemurtadan.

B. Saran

Implikasi dari penelitian ini mendorong peneliti untuk menyusun beberapa saran yang dapat dipertimbangkan, yaitu:

1. Membangun pemahaman yang lebih baik di antara berbagai pihak terkait pernikahan beda agama, mengurangi polarisasi, dan menciptakan ruang dialog yang konstruktif.

2. Untuk penelitian lebih lanjut, disarankan untuk melakukan Perbandingan komparatif terhadap kebijakan pernikahan beda agama di berbagai negara dapat memberikan perspektif yang lebih luas dan menginspirasi pengembangan kebijakan yang lebih inklusif di Indonesia